

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan informasi mendorong proses globalisasi pada setiap negara, globalisasi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat disebuah negara. Globalisasi sendiri juga telah mendorong perkembangan pariwisata dibanyak negara. Termasuk pariwisata di Indonesia dan terkhususnya di Bali.

Namun, globalisasi sendiri tidak hanya berdampak positif bagi perkembangan pariwisata, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatif dari globalisasi adalah terjadinya eksploitasi lingkungan hidup untuk perkembangan industri pariwisata. Hal ini terjadi pada kasus proyek reklamasi Teluk Benoa di Pulau Bali. Potensi pariwisata di pulau Bali yang sangat menjanjikan membuat investor dan pemerintah Bali merencanakan proyek reklamasi di Teluk Benoa tanpa memikirkan dampak negatif proyek tersebut yaitu rusaknya lingkungan disekitar Teluk Benoa dan hilangnya nilai kearifan lokal yang terdapat di Teluk Benoa.

Bali adalah sebuah pulau di sebelah timur pulau Jawa dan sebelah barat pulau Lombok. Terdiri atas beberapa pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Serangan, dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Pulau Bali secara keseluruhan 5.632,86 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya kurang lebih 3, 7 – 4 juta.<sup>1</sup>

Pulau Bali adalah salah satu tempat dimana globalisasi telah terjadi sejak jaman dahulu yang dibuktikan dengan adanya kunjungan wisatawan sejak tahun 1920-an. Globalisasi di Bali terjadi ditandai oleh kedatangan wisatawan

---

<sup>1</sup> “Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)” dalam <http://Bali.bps.go.id/> diakses pada 19 November 2016

mancanegara ke Bali, yang telah dicatat dalam statistik pariwisata Bali sejak tahun 1969. Pertumbuhan pariwisata Bali juga ditandai oleh tumbuhnya berbagai akomodasi seperti hotel berbintang, hotel melati, dan juga pondok wisata, yang tersebar hampir di seluruh Bali. Aspek pariwisata di Bali adalah salah satu aspek yang akan berkembang dan terus berkembang kedepannya. Hal tersebut akan menghasilkan terbukanya lowongan kerja yang besar dan juga sebagai penghasil devisa yang cukup besar. Ketika ekonomi tumbuh, tingkat pendapatan juga akan meningkat. Sebagian besar pendapatan berasal dari pariwisata, dan hal ini terjadi di negara-negara berkembang.

Daya tarik pariwisata utama di Bali adalah pariwisata budaya, yang mengekspos budaya Bali sebagai produk utama, hubungan antara orang Bali dan wisatawan telah menghasilkan akulturasi dan membuat masyarakat Bali hidup dalam dua dunia, yaitu dunia tradisional dan dunia pariwisata. Beragam ekspresi seni tari di Bali tersaji dalam ritual keagamaan, tampil dalam upacara adat, peristiwa sosial sekuler maupun sebagai tontonan wisatawan. Di Bali sendiri terdapat sekitar 1.400 desa adat dengan masyarakatnya yang terkenal ramah. Semua hal tersebut memberikan nilai lebih bagi Bali, sehingga Bali kembali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik (*Island Destination of The Year*) dalam ajang *China Travel & Meeting Industry Awards 2013*<sup>2</sup>. Namun dengan adanya pergeseran arti dari Pariwisata Budaya, kita juga melihat pergeseran dalam urutan prioritas. Hal yang sekarang lebih diperhatikan oleh pembuat kebijakan adalah bagaimana memanfaatkan budaya demi pariwisata, bukan lagi menilai dampak pariwisata terhadap kebudayaan mereka.

Kini Bali dihadapkan pada proyek Reklamasi Teluk Benoa yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

---

<sup>2</sup> "Bab 1 Pendahuluan" dalam <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1190771002-2-30-7-15%20BAB1-PEDAHULUAN.pdf> diakses pada 15 Desember 2016

Desain reklamasi ini sendiri ternyata sudah dibuat pada tahun 2007 lalu. Pembuat desain reklamasi pulau ini, yakni *Tilke Engineers & Architects*, merupakan sebuah perusahaan kelas dunia asal Jerman yang didirikan tahun 1983<sup>3</sup>. Perusahaan tersebut sudah biasa menangani desain untuk berbagai proyek di berbagai belahan dunia seperti proyek hotel di Bahrain, di Shanghai Cina, dan berbagai proyek di belahan dunia lainnya. Namun, proyek reklamasi tentu akan berdampak pada lingkungan, ekonomi, sosial dan ‘jiwa’ dari pariwisata Bali, yakni Pariwisata Budaya. Namun yang terlihat dewasa ini bukanlah pembangunan vila dan hotel, melainkan eksploitasi pariwisata secara berlebihan sehingga berdampak pada alih fungsi lahan hijau.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase<sup>4</sup>. Tujuan utama dari reklamasi adalah menjadikan kawasan perairan yang sudah rusak atau tidak berguna lagi dirubah menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah mengembangkan kota. Reklamasi dilakukan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat tetapi memiliki kendala yaitu semakin menyempitnya lahan. Dengan kondisi tersebut, untuk mengembangkan kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

---

<sup>3</sup> “Reclaim Island Project Bali, Indonesia”, dalam <http://www.tilke.de/en/projects/urban-planning/reclaim-island-project-Bali-indonesia.html> diakses pada 15 Desember 2016

<sup>4</sup> “UU 01 2014 Tentang Perbuahan UU Pengelolaan Wilayah P3K” dalam [www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2015/10/UU-01-2014-ttg-Perubahan-UU-Pegelolaan-Wilayah-P3K.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2015/10/UU-01-2014-ttg-Perubahan-UU-Pegelolaan-Wilayah-P3K.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id) diakses pada 2016

Pada masalah ini banyak dari masyarakat Bali yang belum memahami maksud dari reklamasi, dan keuntungan maupun kerugian dari proyek reklamasi itu sendiri bagi masyarakat Bali terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Badung. Pihak PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT.TWBI) sebagai pengelola proyek reklamasi tidak melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Badung tidak mengetahui apa bagian yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi mereka.

PT.TWBI sebagai pemegang proyek reklamasi di Teluk Benoa tersebut hanya melakukan reklamasi di daerah Teluk Benoa tanpa memikirkan keadaan lingkungan di Teluk Benoa. Gerakan ForBALI yang melatarbelakangi kepentingan masyarakat lokal Bali menganggap kegiatan reklamasi tersebut akan mengganggu tingkat ekosistem yang ada, dan juga mengganggu nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada lama di sekitar wilayah Teluk Benoa tersebut bagi masyarakat tradisional Bali. Ada juga beberapa alasan yang menjadi ide pokok dalam gerakan penolakan ini yaitu diantaranya, Teluk Benoa akan mengalamai rentan bencana, terumbu karang yang berada disana akan mengalami kerusakan, hilangnya fungsi ekosistem hutan mangrove, dan mengakibatkan bencana ekologis yang meluas.

Hal tersebut merupakan alasan meliputi alam, dan juga adanya alasan mengenai keluarnya kebijakan pemerintah tersebut mengarah kepada pembangunan yang akan dilakukan oleh investor akan mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan di wilayah tersebut, karena seperti yang diketahui akan dibangun fasilitas seperti hotel, *resort*, *villa*, dan juga keluarnya kebijakan ini dianggap kebijakan yang pro terhadap investor tanpa memikirkan kepentingan dan suara masyarakat.

Wayan Gendo Suardana selaku koordinator umum beserta aliansi dari ForBALI itu sendiri, terus menyuarakan perlawanannya terhadap proyek reklamasi tersebut baik

melalui event-event tertentu yang ada di Bali, diluar Bali, maupun dikancah internasional dan juga gerakan ini menggunakan kekuatan dari sosial media sebagai alat untuk menyebarkan isu yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional bahwa proyek reklamasi ini dianggap merugikan masyarakat lokal disekitar kawasan Teluk Benoa serta merusak keanekaragaman di Teluk Benoa. Selain dianggap merugikan masyarakat dan merusak habitat di Teluk Benoa itu sendiri.

Dalam kasus ini kelompok masyarakat Bali yaitu Forum Rakyat Bali (*ForBALI*) yang bekerja sama dengan aliansi mereka berjuang selain untuk menyadarkan masyarakat Bali, mereka juga melakukan advokasi dalam upaya menolak proyek reklamasi Teluk Benoa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta penjelasan permasalahan di atas, makadapat ditarik pokok permasalahan seperti berikut ini:

*“Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan ForBALI dalam menolak proyek reklamasi Teluk Benoa?”*

## **C. Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) milik Margareth Keck dan Kathryn Sikkink.

### **Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)**

*Transnational Advocacy Network* menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat<sup>5</sup>. Para aktor ini

---

<sup>5</sup> “Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina” Dalam Jurnal WANUA Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

bekerja sama dengan terorganisir untuk mengangkat isu maupun norma-norma atau fenomena baru.

Menurut Keck & Sikkink Konsep *Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan<sup>6</sup>.

Aktor-aktor yang ada didalam konsep *Transnational Advocacy Network* tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan Jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan.

Jaringan tersebut menjadi semakin penting karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi. Dalam berkampanye, mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang pelestarian lingkungan ataupun sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan<sup>7</sup>.

Menurut konsep *Transnational Advocacy Network* terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu NGO (*Non-Governmental Organizations*) yang berskala nasional maupun internasional, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku

---

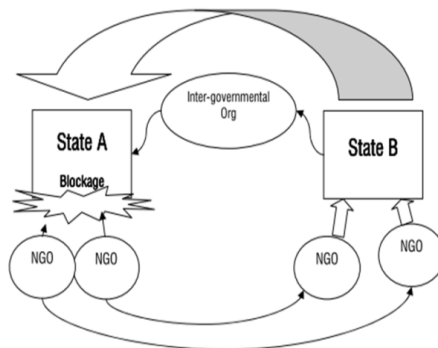
<sup>6</sup> "Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics." Dalam *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. hal. 8

<sup>7</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *op.cit.* hal. 9

aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi *regional* dan *intergovernmental*, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Tidak perlu semua aktor-aktor tersebut untuk membentuk sebuah Jaringan Advokasi Transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan tersebut sudah dapat terbentuk dan dapat berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas serta *local social movements* merupakan aktor yang memiliki peran paling besar menurut konsep *Transnational Advocacy Network*, sedangkan aktor-aktor TAN sering kali memiliki gangguan untuk masuk ke dalam arena politik domestik sebuah negara. Karena itulah mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu tentang persoalan yang sedang dihadapi, dari situlah akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *'Boomerang' pattern*.

Gambar 1.1 Implementasi



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

Pola atau model interaksi aktor dalam TAN adalah *Boomerang Pattern*. *Boomerang Pattern* muncul sebagai pola atau model interaksi antar aktor dalam TAN sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor domestik

dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah-langkah alternatif dengan membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya, dan juga mempengaruhi pemerintahan di negaranya dari luar.

Untuk melaksanakan hal ini, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan TAN ke dalam empat macam, yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

*Information Politics*, yaitu kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan ke mana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh yang besar.

Dalam strategi *Symbolic Politics* kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas.

Anggota dari jaringan juga dapat menggunakan strategi *Leverage Politics* yang dimana anggota dari jaringan tersebut mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut.

Strategi yang terakhir yaitu, anggota jaringan juga dapat menggunakan strategi *Accountability Politics* yang dimana komunitas ataupun anggota dari jaringan tersebut dapat menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka.

Keempat strategi politik tersebut digunakan untuk menganalisa proses advokasi dan strategi-strategi apa saja



yang sudah digunakan oleh gerakan ForBALI untuk mencapai tujuannya baik dalam membentuk opini publik, maupun untuk menentang proyek reklamasi Teluk Benoa.

Jika dilihat menurut strategi politik yang di jelaskan oleh Keck dan Sikkink, Gerakan ForBALI melakukan *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Leverage Politics* untuk membentuk opini publik<sup>8</sup>.

Dalam strategi *Information Politics*, ForBALI selalu menyebarkan informasi dan perkembangan tentang reklamasi Teluk Benoa dan terus menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai informasi yang terus di perbaharui oleh ForBALI melalui websitenya, maupun dari akun media sosialnya dan juga dari beberapa akun musisi-musisi maupun para seniman yang ikut menyuarakan menolak reklamasi di Teluk Benoa. Selain memanfaatkan media sosial, ForBALI juga dibantu oleh media sosial asing yang ikut menyebarkan informasi tentang reklamasi di Teluk Benoa, dan juga ForBALI juga diuntungkan dengan media cetak yang juga membantu mereka dalam menyebarkan informasinya.

Dalam strategi *Symbolic Politics*, salah satu contohnya ForBALI menggunakan cara-cara yang simbolik berupa Aksi damai, Demonstrasi, Konser, dan juga membuat *event* untuk memperingati hari-hari tertentu, salah satunya ‘Bali Tolak Reklamasi Art Event’ pada bulan Oktober 2014<sup>9</sup>.

Dalam strategi *Leverage Politics*, ForBALI memperkuat dan memperluas jaringannya dengan cara menggandeng organisasi internasional yang memiliki *power* lebih besar dan

---

<sup>8</sup> *Loc.cit*

<sup>9</sup> “250 Seniman Tampil di Bali Tolak Reklamasi Art Event” dalam <http://sp.beritasatu.com/home/250-seniman-tampil-di-Bali-tolak-reklamasi-art-event/67313>. diakses pada 19 desember 2016

aktor yang lebih kuat, seperti salah satunya aksi pada skala internasional yaitu ForBALI bekerja sama dengan WALHI dan *Friends of the Earth* dalam melakukan aksi di COP 21, Paris pada 10 Desember 2015.

Sedangkan untuk *Accountability Politics*, ForBALI sebagai gerakan sosial yang mengawasi lingkungan di Bali, khususnya Kawasan Teluk Benoa. ForBALI terus mengawasi pemerintah, salah satunya yaitu ForBALI melaporkan kasus reklamasi tersebut ke lembaga Ombudsman, dari apa yang sudah dilakukan oleh ForBALI sebagai bentuk keseriusan ForBALI sebagai gerakan sosial yang selalu mengawasi pemerintah pusat maupun pemerintah Bali.

#### **D. Hipotesa**

Berikut ini beberapa hipotesa dalam bagaimana strategi advokasi yang dilakukan ForBALI dalam menolak proyek reklamasi Teluk Benoa yaitu Gerakan ForBALI melakukan empat strategi yang dapat digunakan sehingga mampu untuk mencapai tujuan diantaranya :

1. *Information Politics*, memberikan informasi ke nasional dan dunia internasional mengenai proyek reklamasi di Teluk Benoa.
2. *Symbolic Politics*, melakukan aksi damai baik didalam negeri dan juga diluar negeri, melakukan kegiatan-kegiatan seni untuk menarik dukungan masyarakat luas terhadap isu yang diangkat.
3. *Leverage Politics*, memberikan tekanan berupa *Moral Leverage* terhadap pemerintah melalui aksi di tingkat Internasional.
4. *Accountability Politics*, ForBALI sebagai aktor advokasi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Bali dan pemerintahan Indonesia.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh dan cara memobilisasi masyarakat dari Gerakan sosial ForBALI dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan menggunakan mobilisasi masyarakat tersebut dijadikan sebuah *power*.
3. Untuk mengetahui kinerja maupun strategi yang dilakukan oleh ForBALI beserta aliansinya dalam mempengaruhi sebuah kebijakan.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel yang saling berhubungan.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Membatasi suatu penulisan berguna untuk meminimalisir pembahasan yang tidak berhubungan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah. Dengan adanya batasan yang sesuai dengan masalah, bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pencarian data. Jangkauan penelitian sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas secara umum.

Penelitian ini mengambil batasan pada tahun 2013 hingga 2017, dan juga penelitian ini hanya akan membahas tentang peran dan cara dari ForBALI dalam memobilisasi masyarakat Bali, NGO, Seniman dan Musisi, Organisasi lainnya untuk menolak proyek reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dicampur tangani oleh pihak asing. Penelitian ini juga menjelaskan tentang cara advokasi yang dilakukan oleh ForBALI beserta aliansinya dalam menolak proyek reklamasi tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini menggunakan sistem penulisan secara deskriptif dengan membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Pada Bab Pertama, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, akan berisi tentang letak geografis Teluk Benoa yang berisi tentang Peran dari Teluk Benoa, Keanekaragaman Hayati di Teluk Benoa, dan Sebagai Kawasan Konservasi, adapun Dampak dari proyek reklamasi bagi Teluk Benoa.

Bab Ketiga, akan mendeskripsikan tentang profil dari gerakan ForBALI, Latar Belakang dan pertimbangan mereka dalam melawan proyek reklamasi Teluk Benoa, maupun Jaringan dalam gerakan ForBALI.

Bab Keempat, akan mendeskripsikan tentang upaya advokasi yang dilakukan oleh ForBALI sesuai dengan strategi advokasi dalam konsep TAN yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics* dan juga menjelaskan tentang hasil dari advokasi ForBALI dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir yang penulis buat untuk menutup topik ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan dan juga Saran.